

KAJIAN RIPJM BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN PEMALANG DALAM MEWUJUDKAN TARGET PENCAPAIAN MDGs BIDANG LINGKUNGAN

Maryono^{*)}

ABSTRACT

The formulation of Middle Term of Development and Investment Program on Infrastructure (RIPJM) PU Cipta Karya needed the priority base on the main problem and issues. The Government of Pemalang Regency must determine the strategy base on their local potency. RIPJM is a set of program that included all the available sector in the field composed of the public work like the water delivery system, the building arrangement and the environment, sanitation of the settlement environment. The development processes must be support with capacity of institutional arrangement and the local finance. The set of the RIPJM should be the bridging to face the Melanium Development Goals (MDGs).

Key words: *Middle Term Of Development and Investment Program On Infrastruktur (RIPJM), Pemalang Local State, Bridging MDGs*

PENDAHULUAN

MGDs dideklarasikan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 akan mencapai 8 (delapan) target :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
2. Memenuhi pendidikan dasar untuk semua,
3. Mendorong kesetaraan jender & pemberdayaan perempuan,
4. Menurunkan angka kematian balita,
5. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan,
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain,
7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup,
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan,

Dalam target ke 7 dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) butir, yaitu : (1) mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumber daya alam. (2) mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada air bersih yang layak minum, dan (3) berhasil meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.

RIPJM PU/CIPTA KARYA merupakan rencana program investasi pembangunan jangka menengah bidang PU/Ciptakarya. Penyusunan program program investasi pembangunan untuk sektor sarana dan prasarana permukiman (ke-ciptakarya-an) sangat relevan dengan butir-butir pada target ke 7, yang menargetkan pada tahun 2015 harus mengurangi separuh dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan meningkatkan kehidupan di kawasan kumuh melalui peningkatan sanitasi yang baik.

Lebih jauh Tujuan penyiapan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan serta terintegrasi dalam pengembangan wilayah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial yang adil dan demokratis, aman, damai serta kehidupan ekonomi nasional yang lebih sejahtera.

Selain itu penyiapan RPIJM Bidang Cipta Karya adalah dalam rangka meningkatkan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta yang lebih sinergis dan sistematis. Tidak hanya itu, RPIJM Bidang Cipta Karya juga merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009.

MUATAN DOKUMEN RIPJM BIDANG CIPTAKARYA KABUPATEN PEMALANG

Rencana investasi program pembangunan jangka menengah secara menyeluruh memuat tentang arah dan rencana pembangunan bidang PU/Ciptakarya untuk jangka waktu menengah selama 5 tahun. RIPJM merupakan dokumen panduan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang PU/Ciptakarya, yang tersusun secara terpadu, sinergis dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan stakeholder pembangunan.

RIPJM dapat dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali fungsi fungsi pengelolaan dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam kerangka konsep yang memadukan berbagai komponen unsur perencanaan antara kebutuhan teknis teknologi, kebutuhan pembiayaan, kesatuan gerak aktor yang terlibat serta proses perencanaan pembangunan.

Secara umum RIPJM merupakan Dokumen/buku perencanaan yang memuat berbagai substansi permasalahan perencanaan pembangunan bidang PU/Ciptakarya sebagai berikut:

1. Kondisi umum Kabupaten/kota yang menjelaskan profil geografi dan profil demografi, profil ekonomi, profil sosial budaya. Dan gambaran umum kondisi prasarana Bidang PU/Cipta Karya meliputi sub-bidang air minum, sampah, air limbah, drainase, tata bangunan lingkungan, dan pengembangan permukiman.
2. Kajian Dokumen Rencana Tata Ruang yang mengkaji rencana pembangunan yang menjelaskan tentang strategi, skenario pengembangan wilayah dan strategi pembangunan perkotaan.
3. Kajian rencana program investasi masing-masing sub bidang keciptakaryaan meliputi:
 - Rencana pengembangan permukiman;
 - Rencana investasi penataan bangunan dan lingkungan;
 - Rencana investasi air limbah, Rencana investasi persampahan;
 - Rencana investasi drainase; dan
 - Rencana investasi air minum.

Masing-masing rencana investasi sub bidang berisi uraian mengenai kondisi umum, permasalahan, tujuan dan sasaran, usulan program dan asumsi waktu pelaksanaan serta pembiayaan.

4. Kajian mengenai petunjuk umum meliputi penjelasan prinsip-prinsip dasar safeguard, lingkup kerangka safeguard, meliputi komponen sosial, komponen lingkungan dan pembiayaan. Kajian menjelaskan pula mengenai metode pendugaan dampak meliputi pendugaan dampak soial dan dampak lingkungan.
5. Kajian mengenai petunjuk umum dan penjelasan komponen penerimaan daerah serta komponen pembiayaan. Telaah meliputi analisis keuangan, analisis tingkat ketersediaan dana, serta rencana pembiayaan program. Dan petunjuk umum rencana peningkatan pendanaan.
6. Kajian mengenai petunjuk umum, kondisi kelembagaan pengelola sarana dan prasarana keciptakaryaan di daerah. Selanjutnya bab ini menguraikan analisis permasalahan kelembagaan berikut rekomendasi rencana tindakan peningkatan kelembagaan.
7. Konsep dan strategi pengembangan wilayah; skenario pembangunan infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya; ringkasan program investasi infrastruktur. Terakhir bab ini menguraikan mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaan rencana kesepakatan (memorandum) rencana investasi.

PERMASALAHAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTAKARYA KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimum bidang PU khususnya Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2026.

Untuk 5 tahun kedepan maka perlu ditingkatkan investasi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, drainase, air limbah, air minum, dan persampahan serta perlu merinci pendanaan yang dibutuhkan pada setiap kegiatannya yang dituangkan

dalam rencana program investasi jangka menengah (RPIJM).

Hal-hal yang perlu dikemukakan mengenai permasalahan strategi terkait dengan struktur penduduk, kondisi perekonomian, kondisi kemasyarakatan sebagai dasar perumusan program adalah

- Struktur penduduk piramida (banyak usia tertanggung)
- struktur Ekonomi ditandai dengan kegiatan utama penopang perekonomian adalah bidang pertanian, sementara pada kawasan kota pemalang kegiatan utama adalah bidang pemerintahan
- Kondisi Sosio budaya menunjukkan bahwa masyarakat secara umum sulit mengikuti perkembangan dengan tingkat pendidikan mayoritas SD
- Konteks Masyarakat sipil menunjukkan adanya pergeseran panutan sehingga upaya menggerakkan partisipasi masyarakat tidak dapat sekedar bertumpu pada tokoh masyarakat desa.

Sementara itu Hal-hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan permasalahan strategis infrastruktur bidang cipta karya adalah sebagai berikut

- Cakupan air minum pada saat ini berada dalam kategori terendah No 7 dibandingkan dengan wilayah provinsi Jawa Tengah, dimana pelayanannya kurang dari 50%
- Pada saat ini, Umur teknis TPA sudah habis
- Kondisi Air limbah belum tertangani secara terpadu, terprogram
- Kondisi Saluran Drainase secara umum dalam keadaan stagnan
- Pada bidang perumahan terdapat kondisi dimana masih sangat banyak keluarga yang belum memiliki rumah sehat dan layak huni.

PERMASALAHAN PEMBIAYAAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PEMALANG

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

TABEL 1

PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007

Uraian	Jumlah (Rupiah)
Penerimaan Pembiayaan	89.017.553.799
Pengeluaran Pembiayaan	17.368.318.186
PEMBIAYAAN	71.649.235.613

Sumber: Bappeda Kab. Pemalang 2008

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Pemalang pada tahun 2007 sebesar Rp. 89.017.553.799 yang berasal dari Rp. 82.073.553.799 berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Rp. 2.867.000.000 penerimaan pinjaman daerah, Rp. 4.077.000.000 penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari Rp. 2.500.000.000 pembentukan dana cadangan, Rp. 8.500.000.000 penyertaan modal pemerintah daerah, Rp. 3.501.318.186 pembayaran pokok utang, Rp. 2.867.000.000 pemberian pinjaman daerah.

Permasalahan utama pada kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), permasalahan yang masih dijumpai adalah:

- a. Kecilnya potensi PAD, yang menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Dana Perimbangan.
- b. Perlu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan keseimbangan dengan potensi yang ada.
- c. Perlu adanya upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan potensi yang ada serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

- d. Dalam hal pelayanan perlu ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung pembangunan didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan dana melalui berbagai sumber pendanaan, seperti: DAU dan DAK masih sangat dibutuhkan Kabupaten Pemalang. Selain itu peningkatan PAD perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pendapatan yang ada selama ini dan pengawasan, seperti: retribusi parkir, kebersihan dll serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparan dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran seperti dalam manajemen pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat diperoleh melalui:

- Penerimaan pinjaman
- Penjualan obligasi pemerintah daerah
- Hasil privatisasi perusahaan daerah
- Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga
- Penjualan investasi permanen
- Pencairan dana cadangan

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PEMALANG

Pada era pasca krisis ini, reformasi lembaga pemerintahan pusat dan daerah mengalami tantangan yang berat. Di satu sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut untuk melakukan transformasi internal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan globalisasi, dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, namun di pihak lain yang bersangkutan masih mengalami permasalahan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Dalam kerangka inilah maka pelaksanaan implementasi e-government kerap mengalami kendala di lapangan sehingga banyak inisiatifnya yang berjalan

secara lambat dan tersendat-sendat. Bercermin pada keberhasilan sejumlah pengembangan e-government di negara lain, salah satu jawaban terhadap isu terkait adalah dijalinnya kemitraan strategis antara pemerintah dan industri dan swasta dalam merencanakan dan mengembangkan berbagai inisiatif e-government.

Kemitraan yang tangguh tidak saja akan dapat menjawab tantangan jangka pendek implementasi e-government semata, namun dapat menjamin tingginya tingkat sustainabilitas dan kesinambungan program yang ada. Tantangan terbesar dalam proses menjalin kemitraan ini adalah ditemukannya model bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penentuan model bisnis yang dimaksud tidaklah semudah yang diduga, karena selain harus bersifat 'win-win' bagi kedua belah pihak, bentuknya tidak boleh bertentangan dengan peraturan maupun etika bisnis dan pemerintahan yang berlaku. Bagian ini menjelaskan bentuk model bisnis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan pelaku swasta di Kabupaten Pemalang dan tantangannya dalam rangka mencari bentuk kemitraan yang efektif untuk mempercepat implementasi tujuan MGDs.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 465 pegawai, dengan komposisi 93 % berjenis kelamin laki-laki, dan 7 % berjenis perempuan. Namun, berdasarkan jumlah pegawai yang memiliki jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 26 orang yang memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala unit. Jika berdasarkan golongan, dapat diketahui sebagian besar golongan/pangkat pegawai adalah golongan II-A yaitu sebanyak 137 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang adalah lulusan SLTA.

Beberapa permasalahan yang timbul dikalangan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan RIPJM Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya adalah:

1. Dalam pelaksanaan RIPJM Kabupaten Pemalang, diperlukan adanya suatu koordinasi antar berbagai *stakeholder* yang terkait. Salah satu penunjang pelaksanaan RIPJM adalah hubungan

- baik dengan instansi lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Perlunya koordinasi antar berbagai pihak agar dalam perencanaan program sarana dan prasarana tidak terjadi *overlapping*.
2. Berdasarkan uraian dingkat diatas, sebagian besar pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Selayan bergolongan II-A dengan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki adalah SLTA. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Selayan. Padahal dalam pembangunan sarana dan prasarana, selain pengalaman yang dimiliki harus memiliki skill dasar pembangunan infrastruktur.
 3. Belum adanya peraturan dan pedoman yang mengatur pelaksanaan RPIJM Kabupaten Pematang Selayan sehingga ditakutkan akan terjadi penyimpangan antar perencanaan dengan implementasinya.
 4. Kelibatan peran serta masyarakat dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Selayan dalam melaksanakan program-program RPIJM. Usulan program peningkatan kelembagaan yang dapat diusulkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain.
 - Perkuatan institusi untuk manajemen aset dan monitoring & evaluasi infrastruktur Cipta Karya
 - Perlunya peningkatan kerjasama antar instansi baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.
 - Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan kursus.
 - Penambahan fasilitas penunjang kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang Selayan.

KESIMPULAN

Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah (RIPJM) bidang PU Cipta Karya merupakan, suatu langkah komprehensif, terpadu dalam mewujudkan tujuan pembangunan melanium (MDGs). Beberapa kesimpulan yang ditemukan dalam pengalaman penyusunan RIPJM di Kabupaten Pematang Selayan adalah sebagai:

1. RIPJM merupakan upaya pembangunan berbasis perencanaan investasi dibidang PU Ciptakarya. Singkronisasi dengan pengendalian pemanfaatan ruang

menjadi salah satu titik kunci keberhasilannya.

2. Kunci pengusulan program program yang akan dituangkan dalam RIPJM adalah kecermatan dalam memadukan unsur unsur pendekatan perencanaan baik yang bersifat teknis teknologis, penggunaan pendekatan partisipatif dalam menjaring aspirasi masyarakat maupun pendekatan politis dengan mengedapankan dialogis dengan legislatif.
3. Pelaksanaan program program dalam usulan RIPJM sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta kondisi dan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh sebab itu:
 - a. Usulan program harus mengacu pada permasalahan strategis sesuai dengan prioritas
 - b. Pengembangan kapasitas kelembagaan menggunakan pendekatan transparansi dan akuntabel
4. RIPJM akan memuat program program secara komprehensif dalam pencapaian tujuan MDGs bidang lingkungan. Pelaksanaan secara bertahap tahun demi tahun program program RIPJM sebenarnya merupakan tahapan tahapan pencapaian tujuan MDGs

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, John. 1996. *Sharing The City, Community Participation in Urban Management*, London : Earthscan
- Beenhakker, Arie, 1980. *A System for Development Planning and Budgeting*. Hampshire: Gower Publishing Company.
- Conyers, Diana; Hills, Peter 1984. *Introduction to development Planning in the third world*. Chichester: John Wiley & Sons
- Kunaryo, 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta : Aksara Baru.
- Mukherjee, N and van Vijk, Christine. 2002. *Sustainability Planning and Monitoring in Community Water Supply and Sanitation*. New York : WSP – EAP IRC.
- Nieras, RM et all. 2002. *Making Participatory in Local Governace Happen*, Institut of Development Studies, University

of Sussex, Brighton, United Kingdom.

Paul, Samuel 1983. *Strategic Management of Development Programme: guidelines for action*. Management development series No.19. Geneva: International Labor office.

Reksopoetranto, Soemardi, 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.

Rukmana, Nana D.W. et. al. Eds. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.